



MENANTI DASYATNYA BUNYI KETUKAN PALU MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 90/PUU-XXI/2023 SOAL SYARAT USIA
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2024**

~ A. Junaedi Karso ~



A. Junaedi Karso

A. Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasional tahun 2020 adalah Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV, (Res Nulius Law Journal, 2020).



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

☎ 0858 5343 1992
✉ eurekaediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



EC002023141913



**MENANTI DASYATNYA BUNYI KETUKAN
PALU MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MEMBATALKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI/2023
SOAL SYARAT USIA CALON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA 2024**

A.Junaedi Karso



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**MENANTI DASYATNYA BUNYI KETUKAN PALU MAJELIS
KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MEMBATALKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 90/PUU-XXI/2023 SOAL SYARAT USIA CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2024**

Penulis : A.Junaedi Karso

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah

ISBN : 978-623-120-031-0

No. HKI : EC002023141913

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb
Bismillahirohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang **“MENANTI DASYATNYA BUNYI KETUKAN PALU MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI/2023 SOAL SYARAT USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2024”**.

Kami mohon maaf beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutifipan atau salah menorehkan sumber-sumber terkait buku ini. Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, website, google, media masa serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga “Allah SWT” membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 DASYATNYA BUNYI KETUKAN PALU PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Mahkamah Konstitusi	3
C. Memaknai Konstitusi	8
BAB 2 PELAKSANAAN DAN PEMAKNAAN INDEPENDENSI PERADILAN DI INDONESIA.....	13
A. Pendahuluan	13
B. Independsi Mahkamah Konstitusi	14
C. Nuansa Dan Kepentingan Politis Serta Terdapatnya Pelanggaran Etika Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.....	22
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024.....	24
BAB 3 SEJARAH, KEDUDUKA, KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIAASSET UNTUK MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA DI PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT INDONESIA.....	29
A. Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi...29	
B. Kedudukan, Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi.....	68
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi	83
BAB 4 KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DALAM PEMBATALAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN LIVING CONSTITUTION.....	101
A. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	101
B. Hukum Hidup dalam Negara	116
BAB 5 DEMOKRASI INDONESIA ANTARA HIDUP DAN WAFAT TERKENA MOMBARDIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	123
A. Demokrasi Indonesia.....	123

B. Demokrasi di Bidang Politik	130
C. Demokrasi Indonesia antara Hidup dan Wafat.....	133
D. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pecat Ketua Mahkamah Konstitusi.....	135
E. Anwar Usman Harus Lepas Jabatannya	148
F. Funishmen Soal Dugaan Pelanggaran Etik Bagi Anggota Mahkamah Konstitusi	155
DAFTAR PUSTAKA	178
TENTANG PENULIS	187



**MENANTI DASYATNYA BUNYI KETUKAN
PALU MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MEMBATALKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI/2023
SOAL SYARAT USIA CALON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA 2024**



BAB

1

DASYATNYA BUNYI KETUKAN PALU PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat batas usia capres-cawapres. Putusan itu dianggap sarat kepentingan lantaran membuka jalan mulus untuk anak sulung Jokowi maju sebagai cawapres dari KIM. Kemudian pelapor ke MKMK yaitu terkait substansi materi perkara yang sedang diperiksa dibicarakan di ruang publik. Laporan pelanggaran kode etik Anwar Usman dkk ini bermula ketika, para hakim MK menangani perkara soal uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu soal batas usia capres cawapres.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu. *"Putusan itu membuka pintu bagi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi sekaligus keponakan Anwar Usman yang belum berusia 40 tahun untuk maju di Pilpres 2024"*.

"Saat ini, Gibran telah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada kontestasi politik nasional tahun depan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, soal syarat Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024, ditandai dengan Dasyatnya Bunyi Ketukan Palu Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H sang Nahkoda Mahkamah

BAB 2

PELAKSANAAN DAN PEMAKNAAN INDEPENDENSI PERADILAN DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Sang-Hyeon Jeon dari Seoul National University School of Law dengan makalah berjudul *“The Composition of the Constitutional Court and Judicial Independence: Focusing on Experience in Korea”* menarasikan bagaimana pelaksanaan demokrasi konstitusional di Korea. Meski Korea memiliki Konstitusi sebelum 1988, Konstitusi tersebut secara nominal merupakan norma tertinggi, namun selama tiga puluh lima tahun sejak berdirinya, MK Korea Selatan membatalkan sejumlah undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hak konstitusional, membubarkan partai politik, dan memberhentikan Presiden dari jabatannya. Diakui Hyeon bahwa konstitusi telah menjalankan kekuasaan normatif sebagai norma tertinggi, sehingga semua tindakan kekuasaan negara bekerja dalam batas-batas Konstitusi. dengan demikian MK Korea telah memainkan peran penting dalam pembentukan demokrasi konstitusional di Korea. Sehubungan dengan independensi peradilan ini, Hyeon mencermati mengenai komposisi MK yang bertauan dengan perwujudan demokrasi konstitusional.

“Konstitusi Korea mempercayakan susunan MK terdiri atas komponen perwakilan dari Presiden, Majelis Nasional, dan Ketua Mahkamah Agung. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan demokrasi konstitusional di Korea, terdapat kritik mengenai

BAB 3

SEJARAH, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

A. Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi

Dikutip dalam laman Mahkamah Konstitusi (www.mkri.id:04/112023). Lembaran awal sejarah praktik pengujian undang-undang (judicial review) bermula di Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian Undang-Undang Pajak atas Gerbong Kereta Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga tindakan kongres dipandang konstitusional. Itu berarti bahwa MA telah melakukan pengujian undang-undang secara nyata meskipun putusannya tidak membatalkan undang-undang tersebut. Selanjutnya, pada saat MA Amerika Serikat dipimpin oleh John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803, kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan judicial review kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Itulah cikal bakal

BAB 4

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DALAM PEMBATALAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN LIVING CONSTITUTION

A. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi akan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Akankah menyelesaikan kontroversi putusan MK dan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim-hakim MK²⁵.

Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (23/10) mengatakan akan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hal ini untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam memutus uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia minimum capres-cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Juru Bicara Bidang Perkara MK Enny Nurbaningsih dalam jumpa pers di Gedung MK, mengatakan hingga saat ini sudah ada tujuh laporan yang masuk ke lembaganya terkait dugaan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan hakim konstitusi. Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman dan memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), dan aduan yang

²⁵ <https://www.voaindonesia.com/> Fathiyah Wardah, MK akan Bentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 14.21 WIB.

BAB 5 | DEMOKRASI INDONESIA ANTARA HIDUP DAN WAFAT TERKENA MOMBARDIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Demokrasi Indonesia

Demokrasi yang dianut Indonesia⁴⁰ saat ini yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila yang masih dalam taraf perkembangan dan penguatan. Mengenai sifat-sifat dan cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan, tetapi yang tidak dapat disangkal bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyebutkan dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dimana mengenai sistem pemerintahan negara yaitu: Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan menganut sistem konstitusional (ciri khas demokrasi Indonesia yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”). Macam-macam Demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia:

1. Demokrasi Parlementer (Masa 1945 s/d 1959): dikatakan Demokrasi Parlementer karena pada masa ini menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai.
2. Demokrasi Terpimpin (Masa 1959 s/d 1965): pada masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya. Ciri periode ini ialah

⁴⁰ Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila Badan Pengkajian MPR RI Tahun 2018 h.20-22

DAFTAR PUSTAKA

- Adrial Akbar, Mahfud MD di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, detikNews Kamis, (2/11/2023).
- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 64.
- Andi Saputra, Enny Nurbaningsih, hakim MK, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, detikNews, Senin, (20/06/ 2022).
- Anwar Usman Ketua MK, mengatakan jabatan ditentukan oleh Allah, Anwar usai sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (31/10).
- Ari Saputra, Anwar Usman, Ketua MK dalam sidang yang disiarkan kanal YouTube MK, detikNews, Senin (20/6/2022).
- Beni Kurnia Illahi, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Anwar Usman layak diberhentikan secara tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), sindonews.com (27/10/2023)
- Bintan Regen Sara, Anggota MKMK, Bintan Saragih Disenting Opinion, Minta Anwar Usman Dipecat, detikNews,
- Bisariyadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi MK. Hukum yang hidup, Laporan Utama, Dua Dekade Memaknai Peradaban Konstitusi 20 tahun, Konstitutusi No.198-Agustus 2023-ISSN:1829 7692. H. 76-78
- Brigitta Belia, Jimly Asshiddiqie, Banyak intel rupanya di sini kepada wartawan di Gedung MK, Jakpus, detikNews , Kamis (2/11/2023).
- Denny Indrayana, Pakar Hukum Tata Negara, MKMK membatalkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat capres-cawapres, Dalam diskusi Polemik Konsekuensi Putusan MK secara virtual, CNN Indonesia, Sabtu (4/11/2023).

- Dr Muhammad Rullyandi, Pakar Hukum Tata Negara, Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman tak berlaku ke hakim Mahkamah Konstitusi (MK). dalam keterangan pers, detikNews, Selasa (7/11/2023).
- Dr. Wahyu Nugroho, SH. MH. (Peneliti Jimly School of Law and Government/Dosen Fakultas Hukum Usahid) Multitafsir Open Legal Policy Dalam Putusan Mk, Konstitutusi No.198-Agustus 2023-ISSN:1829 7692, h. 8-9
- Han Revanda Putra, Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor, Tempo, Sabtu, (4/11/2023)
- Han Revanda Putra, Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor, Tempo, Sabtu, (4/11/2023)
- Handelsblatt, Laman TIME mengunggah artikel berjudul 'Indonesian Presidential Candidate Names Current President's Son as Running Mate, Laman TIME, Jerman Senin (23/10/2023)
- Hilman Fathurrahman W, Jimly Asshiddiqie, lembaga penegak kode etik mengurus perilaku para hakim lalu membatalkan putusan, tempo.co Jakarta, Rabu, (1/11/ 2023).
- <https://app.cnnindonesia.com/> Adhi Wicaksono "Pakar: MKMK Bisa Batalan Putusan MK Soal Syarat Usia Capres-Cawapres, diakses pada tanggal 3 November 2023, pukul 06.19 WIB.
- <https://app.cnnindonesia.com/> Adhi Wicaksono, Majelis Kehormatan MK Temukan Banyak Masalah Usai Periksa 3 Hakim, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 15.33 WIB.
- <https://app.cnnindonesia.com/> Adhi Wicaksono, MKMK Diminta Pecat Ketua MK Anwar Usman, diakses pada tanggal 3 November 2023, pukul 06.53 WIB.

<https://app.cnnindonesia.com/> ADITYA PRADANA PUTRA, Jimly Anggap Masuk Akal Jika Putusan MK Syarat Cawapres Dibatalkan, diakses pada tanggal 3 November 2023, pukul 06.34 WIB.

<https://app.cnnindonesia.com/> Feri Agus Setyawan, Jimly Curigai Alasan Berbeda Anwar Usman Absen: Konflik atau Sakit, diakses pada tanggal 3 November 2023, pukul 06.44 WIB.

<https://app.cnnindonesia.com/> Jimly Puji Gugatan Mahasiswa NU soal Putusan MK & Anwar Usman: Kreatif, diakses pada tanggal 3 November 2023, pukul 06.31 WIB.

<https://jateng.kilat.com/> Heru Fajar, Adanya Putusan MKMK Jadi Kunci Kembalikan Wibawa Mahkamah Konstitusi, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 15.19 WIB.

<https://nasional.sindonews.com/read/1236495/13/> Ari Sandita Murti kenapa-ketua-mahkamah-konstitusi-anwar-usman-layak-dipecat-1698387051/10, diakses pada tanggal 3 November 2023, pukul 07.06 WIB.

<https://nasional.tempo.co/> Koalisi Indonesia Maju Yakin Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Tak Bisa Diubah, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 16.31 WIB.

<https://nasional.tempo.co/> Koalisi Indonesia Maju Yakin Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Tak Bisa Diubah, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 16.31 WIB.

<https://nasional.tempo.co/> Han Revanda Putra, Linda Novi Trianita, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 15.23 WIB.

<https://news.detik.com/> Brigitta Belia Permata Sari, berita/d-7024276/anggota-mk-mk-bintan-saragih-disenting-opinion-minta-anwar-usman-dipecat. Diakses pada tanggal 7 November 2023, Pukul 20.22 WIB.

<https://news.detik.com/> Brigitta Belia Permata, berita/d-7024239/diberhentikan-dari-ketua-mk-ini-etik-yang-

dilanggar-anwar-usman. Diakses pada tanggal 7 November 2023, Pukul 20.06 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-7024245/mkmk-tak-ubah-putusan-mk-soal-syarat-usia-capres-cawapres>. Diakses pada tanggal 7 November 2023, Pukul 20.20 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-7022990/ahli-hukum-nilai-pasal-17-uu-kekuasaan-kehakiman-tak-berlaku-ke-hakim-mk>. Diakses pada tanggal 7 November 2023, Pukul 19.47 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-6136902/tok-mk-putuskan-anwar-usman-harus-mundur-dari-kursi-ketua>, diakses pada tanggal 3 November 2023, pukul 07.18 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-6137041/Andi-Saputra-alasan-mk-wajibkan-anwar-usman-mundur-dari-kursi-ketua>, diakses pada tanggal 3 November 2023, pukul 07.21 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-7016606/Jimly-Asshiddiqie-sebut-informasi-internal-mk-bocor-ke-publik-banyak-intel-di-sini>, diakses pada tanggal 3 November 2023, pukul 08.08 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-7024298/ini-putusan-lengkap-anwar-usman-diberhentikan-dari-ketua-mk>. Diakses pada tanggal 7 November 2023, Pukul 20.24 WIB.

[https://news.detik.com/pemilu/d-7016438/Inkana-Izatifiqa-R-Putri, media-asing-soroti-gibran-maju-cawapres-sebut-demokrasi-indonesia-mati](https://news.detik.com/pemilu/d-7016438/Inkana-Izatifiqa-R-Putri-media-asing-soroti-gibran-maju-cawapres-sebut-demokrasi-indonesia-mati), diakses pada tanggal 3 November 2023, pukul 07.36 WIB.

<https://news.detik.com/pemilu/d-7016521/tpn-minta-sanksi-berat-jika-hakim-mk-langgar-etik-mahfud-yakin-mkmk-kredibel>, diakses pada tanggal 3 November 2023, pukul 07.49 WIB.

<https://news.detik.com/pemilu/d-7024202/mkmk-perintahkan-pilih-ketua-mk-pengganti-anwar-usman-dalam-2-hari>. Diakses pada tanggal 7 November 2023, Pukul 20.18 WIB.

<https://pshk.or.id/> Kuat Dugaan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Para Guru Besar dan Pengajar Hukum Tata Negara Mendesak Majelis Kehormatan Harus Jatuhkan Sanksi Berat, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 10.12 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231104133822-12-1019964/denny-minta-mkmtak-hanya-beri-sanksi-etik-tapi-juga-batalkan-putusan>, diakses pada tanggal 7 November 2023, pukul 22.04 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231107134455-12-1021004/Jimly-Asshiddiqie-Ketua-MKMK-putusan-mkmtak-9-hakim-mk-langgar-etik-bocor-info-rph-putusan-cawapres>. Diakses pada tanggal 7 November 2023, Pukul 19.32 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231107155934-12-1021103/putusan-mkmtak-anwar-usman-langgar-etik-berat-dicopot-dari-ketua-mk>. Diakses pada tanggal 7 November 2023, Pukul 19.40 WIB.

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6137100/sederet-alasan-mk-putuskan-anwar-usman-harus-lepas-jabatannya>, diakses pada tanggal 3 November 2023, pukul 07.13 WIB.

<https://www.hukumonline.com/Tugas-dan-Wewenang-Majelis-Kehormatan-Mahkamah-Konstitusi>, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 15.26 WIB.

<https://www.hukumonline.com/Willa-Wahyuni-Tugas-dan-Wewenang-Majelis-Kehormatan-Mahkamah-Konstitusi>, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 15.26 WIB.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Beranda&menu=1>, Kedudukan, Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi, © Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Beranda&menu=1>, Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi, ©

Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Beranda&menu=1>, Tugas Pokok Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi, © Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

<https://www.rri.go.id/> Syariful Alam, Bambang Dwiana, Ari Dwi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Keresahan Publik, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 14.24 WIB.

<https://www.suarasurabaya.net/>Ika Suryani Syarief, MKMK: Semua Bukti Soal Dugaan Pelanggaran Etik Sudah Lengkap, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 15.04 WIB.

<https://www.tempo.co/>Amirullah, MKMK akan Pulihkan Nama Baik Hakim Konstitusi Bila Tak Terbukti Melanggar Etik, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 14.54 WIB.

<https://www.tempo.co/>Ananda Ridho Sulistya, Bakal Diumumkan 7 November, Apa Sanksi Hakim MK yang Terbukti Melanggar Kode Etik, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 14.50 WIB.

<https://www.tempo.co/>Jimly Asshiddiqie, MKMK menyatakan bisa membatalkan putusan MK, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 14.58 WIB.

<https://www.tvonenews.com/> Irianto Susilo berita/nasional/163503-majelis-kehormatan-mk-periksa-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim-konstitusi-ini-3-opsi-sanksi-yang-dapat-diberikan?page=3 diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 14.58 WIB.

<https://www.voaindonesia.com/> Fathiyah Wardah, MK akan Bentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 14.21 WIB.

I D.G.Palguna, Ius Honorarium, Konstitutusi No.199-September 2023-ISSN:1829 7692, h. 3-6

imly Ashhiddiqie, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Dalam amar putusan MKMK yang dibacakan saat sidang di Gedung MK, Jakarta, CNN Indonesia, Selasa (7/11/2023).

Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia), wacana hak angket untuk menyelesaikan masalah di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK), jateng.kilat.com, Jumat (3/11/2023).

Jimly Asshiddiqie Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dalam sidang putusan yang digelar di gedung MK, detikNews, Selasa (7/11/2023).

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 293.

Jimly Asshiddiqie, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, Sanksi pemberhentian terhadap Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, detikNews Selasa, 07 Nov 2023

Jimly, Kebohongan (Anwar Usman) hadir dan tidak hadir di sidang, Jakarta, CNN Indonesia, Rabu (1/11/2023).

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 12.58 WIB.

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 13.17 WIB.

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul 13.19 WIB.

Juhaidy Rizaldy Roringkon, Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies, MKMK harus mengedepankan prinsip menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim MK, dan jenis sanksinya hanya teguran lisan, tertulis dan pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim, Rabu, tempo.co (1/11/2023)

Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila Badan Pengkajian MPR RI Tahun 2018

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, detikNews, Selasa (7/11/2023).

Laporan Utama, Dua Dekade Memaknai Peradaban Konstitusi 20 tahun, Konstitutusi No.198-Agustus 2023-ISSN:1829 7692, h. 16-17

Laporan Utama, Dua Dekade Memaknai Peradaban Konstitusi 20 tahun, Konstitutusi No.198-Agustus 2023-ISSN:1829 7692, h. 21-22

Laporan Utama, Dua Dekade Memaknai Peradaban Konstitusi 20 tahun, Konstitutusi No.198-Agustus 2023-ISSN:1829 7692, h. 40-41

Lucius Karus, Peneliti Forum Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), penggunaan Hak Angket DPR terhadap MK tidak tepat, jateng.kilat.com, Jumat (3/11/2023).

Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Jakarta: Retika Aditama, 2009, hlm. 37.

Selasa, 07 Nov 2023

Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, Politik Ketatanegaraan, Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2009, hlm. 40.

Tama S Langkun, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, majelis MKMK itu bisa tetap menjaga independensi dan kemudian juga tegas dalam mengambil keputusan, saat jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, detikNews, Selasa (31/10).

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta:Prenada Media Group, 2010, hlm. 67.

Wahiduddin dalam sidang di gedung MK, Jakpus, detikNews,
Selasa (7/11/2023).

TENTANG PENULIS



A. Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasioal tahun 2020

adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera*, (*Res Nulius Law Journal*, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (*Res Nulius Law Journal*, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (*Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (*Gorontalo Journal of Government and Political Study*, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (*Jurnal MODERAT*, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (*Journal of Government and Civil Society*, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarkan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (*Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO*, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (*Res Nulius Law Journal*, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain *Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty*, (*International Jurnal of Social Science*

Humanities Research, 2019); dan Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency, (IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia, (East African Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019); Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand, (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Piercing Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, (Journal L Sociale, 2020); Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences, 2020); Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); Implementation of *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets, (Journal La Sociale, 2020); The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare, (International Journal of Mechanical and Production engimeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterprises, (Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing

Service throught Digital Technology-based Losencing Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020).

Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rulehttp://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa, 2021).

Sedangkan Buku-buku yang telah di tulis antara lain: Penerapan Good Corporate Governanance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Membangun Kualitaas pelayanan Administrasi Pertanahan; Perkawinan Campuran & Kesejahteraan; Risk Manajemen *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga negara di dalam pembangunan perekonomian, soal, budaya di Kabupaten Indramayu; Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, Terhadap Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Dasyatnya oney Politik Pilkades (Pilwu) di Indramayu; Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan, penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid-19; Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0; Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim Dunia; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi & Ekonomi Masyarakat; Polri di bawah Kementerian

dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Ketegasan Polri & Penegakan Hukum Dalam Membuka Tabir Hitam Kekejaman Fredy Sambo Dalam Kasus Pembunuhan Nopryansah Yoshua Hutabarat, Lintasan Pandangan Mata Yang Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia Lumbung Sawit Dunia Versus Peran Dan Fungsi Kementerian Perdagangan RI Dalam Menanggulangi Tingginya Dan Langkanya Di Pasaran, (Membeli Minyak Goreng Via Kartu Tanda Penduduk), Seputar Linas Kejahatan Realita Antara & Kamuplase Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Siapa Diuntungkan Dan Siapa Yang Buntung Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024 Untuk Kepentingan Rakyat Atau Cukong Dan Merupakan Pemakzulan Konsitusi, Demokrasi Di Indonesia; Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu 2024 Meraung Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; dan Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun Di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024.

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di

PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010. Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain My Dreams Future Procurement break Through di LPKN tahun 2020, Certificate Procurement Contract Legal Expert (CPCLE) di International Federation of Procurement Bar Association (IFPB) tahun 2020, Certificate Procurement in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Balcklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Awareness, Understanding & Implementing Quality Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “How to Perform While Transform” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Certified International Quantitative Research (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, Certified International Qualitative Research (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021.

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023141913, 30 Desember 2023

Pencipta
Nama : **A. Junaedi Karso**
Alamat : Jl. Kebon Randu I RT.005/RW.001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45256

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **A. Junaedi Karso**
Alamat : Jl. Kebon Randu I RT.005/RW.001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45256

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Menanti Dasyatnya Bunyi Ketukan Palu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Soal Syarat Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 21 Desember 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000574866

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.